

**PENANDATANGANAN PERNYATAAN KOMITMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
KEPALA BPKP dan KETUA KPK  
Aula Gandhi, BPKP Pusat, Selasa, 2 September 2014**

Sebagai auditor pemerintah yang memiliki peran sentral dan berada pada garda depan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan, BPKP telah membangun dan mewujudkan berbagai kebijakan penegakan integritas. Seluruh kebijakan tersebut baik internal maupun eksternal bertujuan mendorong penegakan integritas dan perilaku bebas dari KKN.

Secara internal, berbagai peraturan telah diterapkan untuk mewujudkan penegakan integritas mulai dari aturan perilaku, penegakan disiplin, pakta integritas, kepatuhan penyampaian LHKPN, penerapan *e-procurement*, akuntabilitas melalui penerapan aplikasi keuangan, dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Untuk keperluan pelayanan eksternal, BPKP telah membangun sistem dan aturan terkait *whistleblower's system*, layanan informasi publik, standar pelayanan publik, lelang jabatan terbuka, transparansi penerimaan CPNS dan pengendalian gratifikasi.

Penandatanganan Pernyataan Komitmen Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BPKP dilakukan antara Kepala BPKP, Mardiasmo dengan Ketua KPK, Abraham Samad. Turut menyaksikan komitmen ini adalah Deputi Pencegahan KPK, Iswan Elmi; Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB, Muhammad Yusuf Ateh; para Deputi Kepala BPKP; Direktur, Kepala Pusat, Kepala Biro, Kepala Perwakilan BPKP di 33 provinsi. Selain para pegawai, para istri yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan BPKP baik pusat dan daerah juga turut mengikuti acara ini.

Acara yang dirangkaikan dengan pembukaan Rapat Kerja BPKP pada tanggal 2 September 2014 ini merupakan upaya lahiriah dan batiniah mewujudkan integritas organisasi dengan mendorong integritas seluruh anggota organisasi. Upaya ini menunjukkan komitmen keluarga besar BPKP “membunuh” korupsi tepat pada awal mulanya korupsi berasal, yaitu adanya gratifikasi dan dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga.

Menurut Mardiasmo, sebagai institusi pengawasan, BPKP mendukung dan turut berinisiatif mewujudkan transparansi pemerintahan Indonesia. BPKP siap mengawal proses pembangunan dalam strategi *preemptive*, *preventif*, dan *represif*. Strategi tersebut diharapkan tidak hanya memberi dampak pada *maintaining the system*, yaitu menjaga pada ketaatan perundang-undangan, namun demikian mampu memberi dampak perubahan, *changing the system*, membentuk sistem dengan integritas yang lebih baik. Dengan demikian, integritas mampu mendorong peningkatan kinerja dari seluruh sistem, sebagai kontribusi nyata pencapaian tujuan pembangunan nasional.

**Bagian Humas dan HAL BPKP**

Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120

Telp. 021 – 85910031 psw 0102; Faks. 021-8584985

[www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id), [humas@bpkp.go.id](mailto:humas@bpkp.go.id)

CP: Yan Eka Milleza, 081340797489; Harry Bowo, 08159918047